

PENDIDIKAN ISLAM DAN DEMOKRASI

Oleh:

Muhamad Nizar¹, dan Muhammad Tafrihuddin²

Email: muhamadnizareldamiri@gmail.com

Email: muhammadtafrihuddin@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan sebagai Proses perbaikan, Penguatan dan Penyempurnaan terhadap seluruh kemampuan dan potensi manusia. Demokrasi mengambil sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan. Pendidikan demokrasi, sebuah proses pembelajaran yang diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keadaban. Pendidikan demokrasi menuntut adanya perubahan asas *subject matter oriented* menjadi *student oriented*. Tulisan ini pun akan meliputi, tujuan, penerapan, sikap dalam Islam untuk mencapai tujuannya. Metode penulisannya menggunakan analisis deskripsi yang didukung dari beberapa buku hingga adanya teori yang telah dipelajari dan adanya data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Hasil pembahasan Pendidikan Islam dan Demokrasi merupakan sebuah harapan dan tujuan untuk mewujudkan dan membentuk manusia yang taat pada ajaran Islam itu sendiri. Selain memaksimalkan potensi akal diperlukan untuk memfokuskan pada peningkatan spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti, moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kata Kunci: Pendidikan, Islam, dan Demokrasi

A. PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini telah memasuki era modern industry 4.0. Bentuk pembelajaran yang biasanya klasikal sekarang telah berubah menjadi gaya milenial yang semakin membarau. Sasarannya pun tepat pada penekanan kepada pendidik yang harus memiliki inovasi dan dapat mengeksplorasi pembelajaran menjadi lebih efektif. Sebab, pendidikan sebagai proses, dan upaya sadar yang dilakukan pendidik dengan keahliannya untuk mengembangkan potensi peserta didik demi mewujudkan keberhasilan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan terealisasi apabila arah gaya pembelajaran yang memberikan kecenderungan

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

keluwesan, keleluasaan dan kebebasan guru dalam mendesign pembelajaran menjadi lebih kreatif. Yang nantinya akan berdampak pada perkembangan gairah belajar siswa dalam menangkap informasi pengetahuan sebagai keberhasilan pendidikan.

Selain itu, fenomena sekarang bukan zamannya lagi pendidikan sebatas mendengarkan perkataan guru saat mengajar, melainkan harus mampu menggali dan mencari tahu apa yang telah dipelajari. Itulah tanda pendidikan modern. Pembelajaran yang sifatnya berpusat pada peserta didik (*student oriented*), sangat diharapkan untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam belajar.

Bila dikaitkan dengan pandangan Islam bahwa telah diberikan kebebasan kepada individu (anak didik) untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Islam juga memberikan petunjuk kepada para pendidik, sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi-potensinya yang telah dibawanya sejak lahir.

Bentuk keluwesan bagi peserta didik, terlintas memiliki kedekatan dengan makna demokrasi. Secara sederhana demokrasi meninggikan nilai kebebasan yang tetap diatur oleh badan hukum. Keberadaan demokrasi dalam pendidikan secara umum maupun pendidikan islam, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sisi sejarahnya. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad ﷺ yang dikenal dengan istilah “musyawarah”. Kata demokrasi memang tidak ada terdapat secara arti di dalam Al-Quran dan Hadis, namun secara maknanya ada dan bervariasi. Melainkan kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk ke peradaban Islam.

Menurut Hasan Langgulung dalam buku *Asas-Asas Pendidikan Islam* menjelaskan bahwa, Pendidikan dapat di tinjau dari dua segi: *pertama* dari sudut pandang masyarakat dan yang *kedua* dari sudut pandangan individu. Pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi kolonial ke generasi milenial yang tujuannya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat. Kedua, dari segi pandang individu beranggapan bahwa manusia di atas dunia ini mempunyai sejumlah atau seberkas kemampuan yang sifatnya umum. Maksudnya, pendidikan didefinisikan sebagai proses untuk menemukan dan

mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Jadi pendidikan ini berarti proses menampakkan (manifest) potensi diri yang tersembunyi (latent) pada peserta didik (Langgulung, 2003).

Dalam berbagai penafsiran, bahwa makna demokrasi dalam pendidikan mungkin terdapat beberapa konsep, beraneka ragam segi pandangan dalam memberikan arti demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi, demokrasi harus dijadikan filsafat hidup yang harus ditanamkan kepada setiap peserta didik. Imam Wahyudi dalam bukunya “Pengembangan Pendidikan” menjelaskan “Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah menjadi tempat pemenuhan/penampungan harapan masyarakat dari berbagai ketidakjelasan terhadap lembaga pendidikan pada umumnya serta berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Wahyudi, 2012).

Seorang ahli sekaligus doktor Psikologi Abdul Rachman Shaleh, menjelaskan bahwa “Visi dan misi pembangunan Nasional kita adalah untuk memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tenteram dan damai”(Shaleh, 2004). Dengan demikian, dalam proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik. Pendidik hendaknya memposisikan peserta didiknya sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya tersebut. Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran, harus dihindari suasana belajar yang kaku, tegang, syarat dengan perintah dan intruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan. Sehingga akan berdampak pada kegagalan pendidikan.

Sehingga, dalam pandangan Islam pun menyerukan adanya prinsip persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya, dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik, serta tidak pula gender. Bahkan sebagai aplikasi dan prinsip demokrasi, pendidikan diselenggarakan secara gratis, tidak terikat pada batas waktu tertentu, ijazah, atau nilai angka-angka dalam ujian ataupun peraturan-peraturan khusus dalam penerimaan siswa.

Sebaliknya, bila seseorang berkeinginan kuat untuk belajar, cinta kepada ilmu ataupun melakukan penelitian, pintu untuk belajar terbuka luas baginya.

Hasbullah menjelaskan bahwa “dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada anak didik dalam keadaan sewajarnya (intelegensi, kesehatan, keadaan sosial dan sebagainya). Di kalangan Taman Siswa dianut sikap tutwuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya”(Hasbullah, 1996).

Penelitian dalam bentuk jurnal ini akan lebih mendalami hubungan pendidikan Islam dengan demokrasi. Bagaimana idealnya mengenai konsep demokrasi yang dimana telah dikemukakan sebelumnya kecenderungan memiliki sebuah kedekatan makna dalam membangun pembelajaran yang menitikberatkan pada pengembangan potensi cara peserta didik menyerap informasi baik dalam aspek pengetahuan maupun sikapnya. Lalu, bagaimanakah konsep demokrasi berdasarkan perspektif pendidikan Islam, apakah berpengaruh secara signifikan pada keberhasilan pendidikan saat ini dan sedikit melihat melihat aktualisasi konsep demokrasi pendidikan yang terjadi di Negara yang mayoritas Islam salah satunya Negara Indonesia.

B. METODOLOGI

Penelitian ini salah satu bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan filosofis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tiga tahapan yaitu tahapan orientasi, eksplorasi dan studi terfokus. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, untuk menggambarkan hasil deskripsi yang telah dikaji sebelumnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam dan Demokratis

1. Pendidikan Islam

Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata “didik” yang mendapat awalan pe- dan ahiran –an, sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara mendidik atau memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir. Pendidikan secara singkat adalah proses, wadah dalam pencarian ilmu pengetahuan. Adapun, pandangan Islam kata Pendidikan diambil dalam bentuk (Bahasa Arab) yaitu *Tarbiyyah* yang mengandung arti mendidik dan mengatur. Secara (Terminologi) Pendidikan adalah Proses perbaikan, Penguatan dan Penyempurnaan terhadap seluruh kemampuan dan potensi manusia (Roqib, 2009).

Menurut Theodore Mayer Greene mendefinisikan pendidikan sebagai usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna. Sedangkan kata Islam merupakan turunan dari kata *assalmu, assalamu, assalamatu* yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Makna lain dari turunan Islam adalah “damai” atau “perdamaian” (al-salmu/peace) dan “keamanan”.

Secara (terminologis) pengertian Islam diungkapkan Ahmad Abdullah Almasdoosi sebagai kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material (Mahfud, 2011). Lalu, statement yang lain dikuatkan dari mulai Ahmad Tafsir bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (Majid & Andayani, 2006).

Pendidikan dulu hingga saat ini dijadikan sebagai proses bimbingan manusia dari kegelapan, kebodohan, menuju kecerdasan pengetahuan. Dalam kitab *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa al-Ta'lim al-Islamiyah* yang sudah diterjemahkan serta dikutip pula oleh Rasyid Ridha, bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan daya manusia baik jasmani, akhlak, maupun jiwa yang menjadikannya tumbuh dan berkembang serta bergerak sehingga sampai kepada kesempurnaan dirinya.

Pendidikan Islam hakikatnya adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih positif. Erat kaitanya dengan jalan dakwah. Isinya *Amar' Ma'ruf Nahi Munkar*, mengajak masyarakat kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang mungkar atau tercela (Bawani, 1987). Sebagaimana firman Allah dalam QS. *Ali Imran* ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. *Ali Imran* [3]: 104).

Pendidikan Islam memiliki sinkronisasi dengan wahyu yang pertama diturunkan yakni Al-Qur'an surah *Al-'Alaq* yang dimulai sebagai proses pengajaran membaca. Sebuah Proses memanusiaikan manusia yang tetap berpegang teguh pada ketentuan Allah sesuai dalil Kittabullah yang senantiasa menjadi pedoman untuk dipelajari. Al Qur'an adalah sebagai sumbernya ilmu yang menjembati pengetahuan yang bisa dihasilkan berdasarkan dalil bukan secara rasional/akal pikiran saja.

Menurut Ahmad Marimba dalam bukunya “*Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*” bahwa Pendidikan Islam diartikan sebagai bimbingan jasmaniah dan ruhaniah manusia yang diatur hukum-hukum Islam untuk membentuk kepribadian muslim. Kepribadian yang menciptakan manusia menjadi khalifah dimuka bumi demi kepribadian yang (*Insan Kamil*) sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Dalam buku *Krisis Pendidikan Islam*, ada pernyataan dari Syed Ali Ashraf dan Syed Sajjad Husein, ia mengatakan Pendidikan Islam suatu proses pendidikan yang mampu melatih peserta didik menjadi manusia rasional yang berbudi luhur (Agama), dan melahirkan kesejahteraan spiritual, moral dan fisik baik dalam keluarga, bangsa dan seluruh umat manusia (Ashraf & Husein, 1986).

Dari pelbagai pendapat yang dikemukakan mengenai definisi pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem pembelajaran yang bukan berhubungan dengan pengetahuan akal saja yang

diberikan ilmu pengetahuan akan tetapi hati kita juga diberikan pembelajaran sehingga menghasilkan *Insan kamil* (pribadi yang paripurna).

2. Demokrasi

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi “*demos-cratein*” atau “*demos-cratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (A. Ubaidillah & Dkk, 2000).

Adapun secara harfiah bahwa kata demokrasi berarti “kedaulatan, atau kekuasaan rakyat”, tetapi secara operasional arti yang diberikan kepada demokrasi sangat beragam, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol. Joseph A. Schmitter mengartikan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Diperkuat dengan statemet Sidney Hook demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat.

Dari pelbagai pengertian umum yang tergambar dalam ragam pandangan ilmuan mengenai batasan (definisi) tentang demokrasi menurut para pakar diatas, terdapat tiga nilai utama yang terdapat pada prinsip (eksistensial) yang mendasari tumbuhnya demokrasi, yaitu: kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan suara mayoritas (Nurtjahjo, 2008). Dan demokrasi baru dapat dikatakan tercipta apabila kebebasan yang bertanggung jawab dapat diwujudkan dan pengakuan akan hak-hak asasi bagi setiap individu telah ditegakkan, bukan persamaan hak-hak kelompok semata-mata dan bukan pula untuk tujuan menghimpun aneka kekuatan sosial yang ada.

Dalam pandangan Islam, demokrasi tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan tiga unsur pokok, yaitu: *persamaan, tanggung jawab dan tegaknya hukum berdasar syura* dan atas dasar peraturan

perundangan yang jelas dan tanpa pandang bulu. Karena itu, tidak berlebihan jika cendekiawan Mesir, Abbas Mahmud al-Aqqad dalam bukunya *Al-Dimokratiyah fi al-Islam* yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menyatakan bahwa: ide demokrasi dibentuk pertama kali dalam sejarah dunia oleh ajaran Islam (Shihab, 2010).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan persamaan derajat antara semua manusia, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al Hujurat [49]: 13)

Lalu, ada dalil Al-Quran yang menegaskan tentang tanggung jawab pribadi manusia, Allah berfirman:

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفُكْهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢١

Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (At Thur [52]: 21)

Al-Quran juga menegaskan mengenai kewajiban menegakkan hukum, walau terhadap keluarga sendiri, bahkan perlunya berlaku adil walau terhadap siapa yang dibenci sekalipun, sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Al Maidah [5]: 8)

Jika ketiga prinsip dasar di atas itu dapat terwujud dalam pengaplikasian di suatu masyarakat, maka tonggak demokrasi dipancarkan. Demokrasi berubah menjadi positif dan terjaga apabila tetap bersandar pada nilai keruhanian yang menjadi kebenaran yang mutlak. Maka, secara umum adanya bentuk demokrasi dalam Pendidikan Islam dapat menciptakan sebuah definisi yang konkret. Sebuah usaha organisasi atau badan pendidikan dalam mewadahi dengan mewujudkan semua elemen penting baik dalam sarana, pendidik hingga peserta didik menjadi kesatuan yang dapat menciptakan cita-cita bangsa maupun ajaran Islam.

Hubungan Pendidikan Islam dan Demokrasi

Seiring pesatnya perkembangan zaman, bahwa demokrasi bukan hanya tumbuh pada sektor politik saja, akan tetapi sudah merambah pada sektor lain, seperti: ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan (demokrasi pendidikan) (Santosa, 2009). Mencermati pembahasan ini yang berhubungan besar dengan pendidikan. Bahwa demokrasi dalam pendidikan dimaknai secara luas. Namun, secara garis besar ruang lingkupnya berada dalam pembelajaran. Disini terjadi ketika memposisikan peserta didik aktif dan bebas-tidak ada paksaan dalam menyampaikan pendapat. Agar pembelajaran menjadi aktif dan bervariasi.

Abdurrahman Saleh Abdullah menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang sebagai proses pemaksaan dan pengekan secara individual terhadap peserta didik. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan (Santosa, 2009).

Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktek demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan

itu dilaksanakan di tingkat lokal sesuai ruang lingkup pendidikan dilaksanakan. Di dalam pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keadaban. Fungsi pendidikan dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator.

Dikatakan fasilitator, pendidikan harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sebagai dinamisator, pendidikan harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidikan harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar peserta didik bebas belajar (menemukan proses penyerapan informasi bagi peserta didik). Sebagai motivator, pendidikan harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.

Pendidikan demokrasi menuntut adanya perubahan asas *subject matter oriented* menjadi *student oriented*. Suasana pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan aspek egalitarian (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara pendidik dengan peserta didik. Pengajaran tidak harus *top down*, namun diimbangi dengan *bottom up*. Tidak ada lagi pemaksaan kehendak dari pendidik, tetapi akan terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, dan evaluasi hasil belajarnya. Dengan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didik, akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggungjawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berprasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri, asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peserta didik bukan saja memahami demokrasi, tetapi juga menjalani latihan seperti berdebat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam diskusi.

Berdasarkan hal tersebut, kita memaknai demokrasi dan pendidikan secara umum. Tetapi, kita hubungkan ada daya kuat bahwa makna demokrasi pun sama dengan Pendidikan Islam, yang membedakan di sini yang menjadi sumber kekuatannya pada sisi ruhaniahnya. Dilihat dari sudut pendidikannya, bahwa nilainya mengandung dan berorientasi dalam membentuk peserta didik yang

beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, memiliki pengetahuan yang luas dan berakhlakul karimah sekaligus membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan dengan kedekatannya kepada masyarakat muslim. Pendidikan Islam memiliki potensi dalam pembentukan *civil society*, masyarakat madani, atau masyarakat-kewarganegaraan pada tingkat akar rumput kaum muslimin. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana pendidikan kritis bagi rakyat; membebaskan lapisan terbawah masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan kemiskinan (Fahmi, 2016). Di sini, pendidikan Islam dapat menjadi lembaga pendidikan penting dalam penanaman dan penumbuhan nilai-nilai demokrasi.

Melalui keberhasilan penerapan Pendidikan Islam dalam memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya maka akan memudahkan bagi keberhasilan Pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik, memiliki ketrampilan dan memiliki akhlak mulia. Upaya mensinergiskan pendidikan Islam dan demokrasi perlu dilakukan dengan menjadikan Islam sebagai sumber nilai untuk membangun karakter bangsa, sehingga melahirkan pendidikan Islam yang berwawasan kebangsaan. Dengan demikian, umat Islam (peserta didik) akan menjadi umat yang sholeh sekaligus menjadi warga negara yang baik. Di samping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur.

Pendidikan Islam juga memfokuskan pada peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti, moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama (Mas'ud, 2008). Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman nilai-nilai keagamaan, yang pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Inilah relevansi dengan makna demokrasi dalam pendidikan, adanya unsur keluwesan dan semua tergantung kepada pendirian peserta didik yang dijadikan sebagai eksekutor di mana pendidik sebagai mediator pembelajaran yang membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik.

Dalam sejarah perkembangannya, Demokrasi pendidikan banyak sekali ragam konsep yang terjadi di beberapa negaram salah satunya negara kita Republik Indonesia. Di Indonesia, demokrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai hak setiap warga negara atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk menikmati pendidikan, yang sesuai dengan bunyi pernyataan *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1)*, yaitu: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Demokrasi Pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia.

Melalui upaya demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif dalam kehidupan. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakup orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Demokrasi Pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan peserta didik, juga dengan pengelola pendidikan. Dalam Islam, sistem demokrasi sendiri telah dibenarkan dan dipraktekkan oleh beberapa negara Muslim. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran Islam seperti keadilan (*'adl*), persamaan (*musawah*), dan musyawarah (*syura*). Dengan demikian, konsep demokrasi dalam pendidikan Islam merupakan suatu tawaran yang dapat diterima untuk mewujudkan tujuan membentuk manusia yang taat pada ajaran Islam itu sendiri. Agar umat Islam dapat berkompetisi dalam peradaban global, maka konsep tersebut perlu diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam saat ini.

Di Indonesia, secara umum, pendidikan umum lebih bisa menerapkan sistem demokrasi, dibandingkan dengan pesantren. Di dalam pesantren, sistemnya masih cenderung bersifat sentralistik atau semu tersentral pada peran seorang kyai atau ulama yang menjadi pengasuh dalam pesantren. Sistem sentralisasi yang ada dalam pesantren ibarat sistem pendidikan di bawah kekuasaan rezim orde baru yang semua tersentral dalam satu muara. Hal itulah yang kemudian menuntut lembaga pendidikan Islam (semisal pesantren) untuk lebih kreatif dan menuju pada sistem yang demokratis, terutama dalam hal pengelolaan pendidikannya.

Sementara itu, demokrasi pendidikan baik secara umum maupun Islam lainnya terjadi di Mesir. Sebuah kota para ulama terkemuka. Kementerian pendidikan Mesir menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah sebagai berikut: (1). Pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis; (2). Pendidikan juga dimaksudkan sebagai upaya pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja; (3). Pendidikan juga diarahkan pada penguatan kepemilikan individu terhadap bangsa, dan penguatan atas budaya dan identitas Arab; (4). Pendidikan harus mampu menggiring masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri; (5). Pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemauan baca tulis, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan; (6). Pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan penilaian.

Sebagai negara yang padat penduduk dan memiliki banyak lembaga pendidikan guru dan siswa, Mesir telah mengembangkan suatu sistem pelatihan guru melalui pelatihan jarak jauh (*distance learning/training*) dengan menggunakan keunggulan teknologi informasi. Model ini juga penting dan sedang terjadi di Indonesia yang sedang terjadi fenomena wabah Covid-19, semua akses pembelajaran berjalan secara online/daring. Maka, digali dan dianalisis untuk dikembangkan di Indonesia agar pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada guru dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tradisi agama yang kuat, Mesir memiliki sistem

pembelajaran agama Islam yang sangat kuat. Standar untuk pendidikan Islam pun dilakukan dengan standar yang lebih menjamin lulusan pendidikan keagamaan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang kuat. Karena itu, dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan agama, pendidikan Islam di Mesir sering menjadi rujukan negara-negara Islam lainnya.

Misalnya, sistem pendidikan al-Azhar Cairo, sebuah kampus yang paling banyak diminati pelajar Indonesia untuk membuka cakrawala pengetahuan secara luas dan terbuka untuk menerima calon mahasiswa dari berbagai lulusan sekolah menengah namun mereka harus lulus seleksi, memiliki ijazah yang diakui setara, dan harus mengikuti matrikulasi bagi mereka yang dianggap belum cukup dapat melanjutkan kuliah. Upaya demokratisasi pendidikan Islam di Mesir pun bisa dilakukan. Kesempatan berpendidikan bagi masyarakatnya ditingkatkan. Mesir telah mengalami transformasi cepat dalam hal pendidikan. Berdasarkan data Dirjen Dikti 1997, yang dikutip oleh Abd. Rachman Assegaf, dalam satu juta penduduk di Mesir terdapat 400 doktor, suatu angka yang signifikan bila dibandingkan dengan potensi *human resources* di negara-negara Islam anggota OKI lainnya. Dalam skala yang sama, Indonesia hanya mencapai angka 65 doktor per satu juta orang.

D. KESIMPULAN

Pendidikan adalah proses perbaikan, penguatan dan penyempurnaan terhadap seluruh kemampuan dan potensi manusia. Sedangkan, Islam merupakan kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material. Maka, Pendidikan Islam dijadikan bimbingan jasmaniah dan ruhaniah manusia yang diatur hukum-hukum Islam untuk membentuk kepribadian muslim. Adapun makna demokrasi sebuah perwujudan dari hak kebebasan manusia dalam mengetahui potensi untuk dikembangkan.

Pendidikan demokrasi secara kuat bahwa maknanya pada perubahan asas *subject matter oriented* menjadi *student oriented*. Bagaimana menghadirkan model pembelajaran modern yang mendayagunakan anak didik menjadi berpikir secara kritis dan berperan aktif dimana akan tercipta tujuan pendidikan nasional.

Adapun, Hubungan (relevansi) Pendidikan Islam dan Demokrasi merupakan sebuah harapan dan tujuan untuk mewujudkan dan membentuk manusia yang taat pada ajaran Islam itu sendiri. Selain memaksimalkan potensi akal diperlukan untuk memfokuskan pada peningkatan spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti, moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Agar umat Islam dapat berkompetisi dalam peradaban global, maka konsep tersebut perlu diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, & Dkk. (2000). *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. IAIN Jakarta Press.
- Ashraf, S. A., & Husein, S. S. (1986). *Krisis Pendidikan Islam*. Risalah.
- Bawani, I. (1987). *Segi-segi Pendidikan Islam*. Al-Ihlas.
- Fahmi, M. (2016). Pendidikan Islam, Demokratisasi, dan Kewarganegaraan. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 95–121.
- Hasbullah. (1996). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Langgulong, H. (2003). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Pustaka Al-Husna Baru.
- Mahfud, R. (2011). *Al-Islam*. Penerbit Erlangga.
- Majid, A., & Andayani, D. (2006). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurtjahjo, H. (2008). *Filsafat Demokrasi*. PT. Bumi Aksara.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat)*. LKis.
- Santosa, K. O. (2009). *Mencari Demokrasi: Gagasan dan Pemikiran*. Segi Arsy.
- Shaleh, A. R. (2004). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, Q. (2010). *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Lentera Hati.
- Wahyudi, I. (2012). *Pengembangan Pendidikan*. Prestasi Pustakarya.